

RELASI GENDER DALAM KELUARGA: INTERNALISASI NILAI-NILAI KESETARAAN DALAM MEMPERKUAT FUNGSI KELUARGA

Lilis Widaningsih, SPd.,MT.

*Staf Pengajar pada Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur Fakultas Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia dan Tim Pokja Gender Bidang Pendidikan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat*

Abstrak

Gender masih menjadi isu penting dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara. Munculnya berbagai ketimpangan dan ketidakadilan gender merupakan salah satu pemicu munculnya gagasan kesetaraan gender di semua aspek kehidupan baik di ranah domestik maupun publik. Keluarga, sebagai sub sistem dari masyarakat, memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola hubungan antar anggota keluarga, karena dalam keluargalah semua struktur, peran, fungsi sebuah sistem berada. Dalam keluarga terjadi proses negosiasi yang tidak akan pernah selesai, di mana segala bentuk perbedaan harus menemukan harmoninya dengan pembagian peran dan fungsi yang seimbang antar anggota keluarga yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak-anak. Oleh karenanya, dengan berbagai perbedaan itulah, seluruh anggota keluarga dapat memperkuat fungsi keluarga sebagai institusi pertama bagi setiap anak manusia untuk mengenal dirinya, lingkungannya, tempat tumbuh dan berkembang, saling mengasahi, melakukan proses pendidikan, membentuk karakter setiap individu dan mempersiapkan setiap individu (anak) untuk mencapai tujuan utama sebagai manusia yang berkualitas.

Kata kunci: Relasi gender, nilai-nilai kesetaraan, Fungsi keluarga

Pendahuluan

Keluarga merupakan sub sistem dari masyarakat dan negara, yang memiliki struktur sosial serta sistemnya sendiri. Dalam keluarga, kehidupan seseorang dimulai, dimana seorang anak mendapat perlindungan dengan nyaman, seorang istri/ibu melakukan tugas, mendapatkan haknya dan melakukan tugas-tugas keibuannya, seorang ayah/suami memberikan kenyamanan, ketentraman, melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala keluarga. Banyak hal dimulai dari rumah, anak tumbuh dan berkembang, mengenal dirinya, ayah dan ibunya, saudara-saudaranya, belajar memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitar lingkungannya termasuk mengenal berbagai perbedaan bahkan konflik yang terjadi.

Sungguh ironis, jika setiap hari selalu ada berita yang tersaji di koran atau televisi yang menginformasikan terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagian besar kekerasan tersebut terjadi pada perempuan dan anak-anak yang secara sosial masih dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya. Bagaimana tidak, institusi keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman, damai dan tentram bagi seluruh anggotanya. Namun, pada faktanya masih banyak terjadi kekerasan yang menyisakan persoalan besar bukan saja bagi

keluarga yang bersangkutan tetapi pada aspek yang lebih luas, kekerasan dalam rumah tangga merupakan ancaman substantif pada masalah kualitas sumber daya manusia secara umum. Disadari atau tidak, apabila hal itu terus berlangsung bukan saja telah mengganggu sistem dalam institusi keluarga, tetapi juga sistem dalam masyarakat dan negara.

Persoalan yang terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender. Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan) seringkali memposisikan laki-laki lebih mendapatkan hak-hak istimewa, sedangkan perempuan sebagai kaum kelas kedua. Meskipun pada kelompok masyarakat tertentu (kelas menengah dan berpendidikan, misalnya) relasi yang dibangun antara perempuan dan laki-laki sudah lebih baik, tetapi jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok masyarakat lainnya, relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki masih jauh dari harapan.

Makalah ini sedikit mengulas bagaimana sebenarnya fungsi keluarga dalam menginternalisasikan nilai-nilai kesetaraan gender, membangun relasi antaranggota keluarga yang seimbang serta bagaimana sebenarnya posisi serta peran gender dalam keluarga.

Konsep dan Kesetaraan Gender

Konsep gender yang dipahami sebagian besar orang seringkali bias dan lebih diartikan sangat sempit sebagai sebuah konsep yang hanya membicarakan masalah perempuan dengan kodrat keperempuaannya saja. Padahal gender berbeda dengan jenis kelamin, dia tidak hanya membicarakan perempuan saja ataupun laki-laki saja, bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan (dibangun) oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara dan agama. Oleh karenanya, perbedaan peran, perilaku, sifat laki-laki dan perempuan yang berlaku di suatu tempat/budaya belum tentu sama atau berlaku di tempat yang berbeda.

Perbedaan gender dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

GENDER	JENIS KELAMIN
Perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan hasil konstruksi sosial Buatan manusia Tidak bersifat kodrat Dapat berubah Dapat ditukar Tergantung waktu dan budaya setempat	Perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian reproduksi Ciptaan Tuhan Tidak dapat berubah Tidak dapat ditukar Berlaku sepanjang zaman dan dimana saja Perempuan: hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi Laki-laki: membuahi (spermatozoa)

Pengertian gender juga termasuk membicarakan relasi antara perempuan dan laki-laki serta cara bagaimana relasi itu dibangun dan didukung oleh masyarakat. Seperti halnya konsep kelas, ras, dan suku, gender merupakan alat analisis untuk memahami relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki. Sampai saat ini, hambatan bagi terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki lebih banyak disebabkan oleh kesenjangan perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Kesenjangan relasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, budaya, ekonomi dan agama yang mengakar sangat kuat secara turun temurun di kalangan masyarakat. Kenyataan seperti inilah yang berdampak pada kehidupan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun di ranah publik (masyarakat, dunia kerja, dunia pendidikan).

Laporan Situasi Anak Dunia Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak (UNICEF) tahun 2007 yang bertema "Women and Children: The Double Devinded of Gender Equality" menyerukan kesetaraan gender sebagai agenda penting abad ini (Hartiningasih, 2007). Laporan itu menegaskan, kesetaraan relasi kuasa antara dua jenis kelamin yang dikonstruksikan secara sosial (gender) itu tidak hanya merupakan hak moral, tetapi juga landasan sangat penting bagi kemajuan manusia dan keberlanjutan pembangunan dalam arti luas.

Diskriminasi terhadap perempuan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia masih menunjukkan bahwa pemahaman serta usaha-usaha untuk mewujudkan kesetaraan gender masih banyak menemukan kendala. Masih kuatnya budaya patriarkis (budaya yang didasarkan pada kekuasaan laki-laki) masih memposisikan perempuan pada streotype, peran, dan posisi yang termarginalkan. Padahal, relasi yang seimbang (kesetaraan gender) antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan dapat mendorong percepatan proses pembangunan yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi tanpa adanya imperioritas satu jenis kelamin di satu sisi dan superioritas jenis kelamin di sisi lainnya.

Kesetaraan gender menurut Laporan UNICEF 2007 (Hartiningasih 2007) akan menghasilkan "deviden" ganda. Perempuan yang sehat, berpendidikan, berdaya akan memiliki anak-anak perempuan dan laki-laki yang sehat, berpendidikan dan percaya diri. Pengaruh perempuan yang besar dalam rumah tangga, telah memperlihatkan dampak yang positif pada gizi, perawatan kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka.

Laporan tersebut juga menggarisbawahi upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, salah satu dan yang terpenting adalah melalui pendidikan disamping faktor lain seperti pendanaan, legislasi, kuota parlemen dan lain-lain yang dapat mendorong terciptanya kesetaraan gender. Pendidikan menjadi faktor terpenting dalam proses perkembangan seseorang. Pendidikan di sini tentunya tidak sebatas pendidikan formal (sekolah), tetapi juga pendidikan di dalam keluarga.

Suatu paradigma baru sangat diperlukan untuk memberikan kerangka dan menjelaskan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki di berbagai lapisan masyarakat, lembaga formal maupun lembaga informal termasuk institusi keluarga. Strategi-strategi untuk perubahan diperlukan yaitu bagaimana melakukan perubahan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki yang responsif gender sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender .

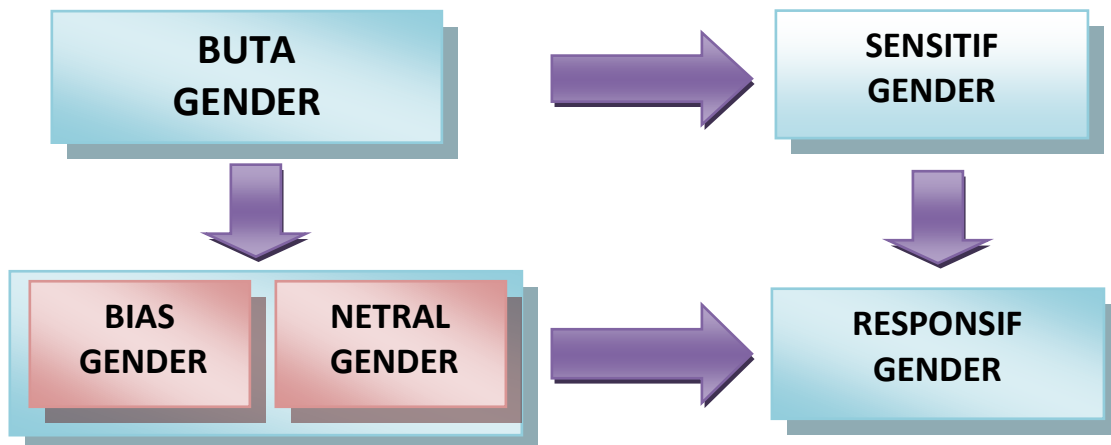
Kesetaraan gender menurut Laporan UNICEF 2007 (Hartiningasih, 2007) akan menghasilkan "deviden" ganda. Perempuan yang sehat, berpendidikan, berdaya akan memiliki anak-anak perempuan dan laki-laki yang sehat, berpendidikan dan percaya diri. Pengaruh perempuan yang besar dalam rumah tangga, telah memperlihatkan dampak yang positif pada gizi, perawatan kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka.

Maka upaya yang harus dilakukan adalah penguatan *mainstream* (Pengarusutamaan) gender yang merupakan suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Pengarusutamaan gender merupakan seperangkat proses dan strategi yang bertujuan agar supaya isu-isu gender/kesenjangan-

kesenjangan gender dikenali dan diatasi melalui kebijakan, program dan pelayanan-pelayanan yang berkesinambungan. Maksud dipergunakannya pengarusutamaan gender adalah untuk menjamin supaya perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh manfaat pembangunan sehingga kesenjangan gender terhapuskan.

Perubahan yang diharapkan dari pengarusutamaan gender antara lain mengubah individu, masyarakat atau lembaga yang awalnya buta dan bias gender, meningkat menjadi responsif gender dan akhirnya menjadi sensitif gender. Buta gender adalah kondisi seseorang, masyarakat dimana sama sekali tidak memahami pengertian gender dan permasalahan gender. Bias gender adalah kondisi yang menguntungkan pada salah satu jenis kelamin yang berakibat munculnya permasalahan gender. Netral gender adalah kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. Responsif gender adalah kondisi yang memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan & keadilan pada berbagai aspek kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan sensitif gender adalah Kemampuan dan kepekaan dalam melihat dan menilai berbagai aspek kehidupan dan hasil pembangunan dari perspektif gender (ada perbedaan aspirasi, kebutuhan, dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan).

Perubahan yang diharapkan dari *mainstream* Gender



Bagaimana Relasi Gender dalam Keluarga Dapat Dibangun?

Dalam teori struktural-fungsional, peran masing-masing anggota keluarga sangat ditentukan oleh struktur kekuasaan laki-laki (ayah) sebagai kepala keluarga yang secara hierarkis memiliki kewenangan paling tinggi dalam keputusan-keputusan keluarga. Hierarki dilanjutkan pada perbedaan usia dan jenis kelamin anggota keluarga, misalnya saudara laki-laki memiliki struktur sosial lebih tinggi dibanding saudara perempuan. Relasi yang terbangun seringkali menempatkan seolah-olah laki-laki memiliki kemampuan/kekuasaan/kekuatan lebih besar dibanding anggota keluarga perempuan. Banyak stereotype bahkan mitos yang sudah tertanam di masyarakat, misalnya tanggungjawab mutlak terhadap ekonomi keluarga hanya ada di tangan ayah/suami, sementara tanggungjawab domestik melulu tanggung jawab ibu/istri. Padahal, faktanya begitu banyak kaum perempuan (istri/ibu) yang mampu menjadi tulang punggung keluarga, secara mandiri menghidupi keluarganya dan lebih mampu bertahan dalam kesulitan ekonomi keluarga. Banyak pedagang perempuan di pasar-pasar tradisional, buruh

pabrik perempuan yang secara tekun dan pantang menyerah, sampai pada profesi terhormat di masyarakat, mampu menjadi sumber ekonomi keluarga. Tetapi dalam tradisi di banyak daerah, peran perempuan dalam memperkuat ekonomi keluarga tersebut seringkali tidak diperhitungkan dan selalu dianggap sebagai pelengkap saja (pencari nafkah tambahan).

Persepsi seperti itu tidak saja mengesampingkan peran perempuan dalam keluarga tetapi di sisi lain membebani kaum laki-laki dengan tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga. Atau sebaliknya, karena peran mutlak yang dibebankan kepada suami/ayah sebagai pencari nafkah, sehingga peran lain seperti pengasuhan dan pendidikan anak, serta peran-peran domestik lainnya menjadi peran mutlak ibu/istri. Kesetaraan gender dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun masyarakat sehingga tidak ada peran-peran yang dilabelkan mutlak milik laki-laki saja atau milik perempuan saja.

Jika diamati, pada saat krisis ekonomi terjadi, dimana banyak pekerja (laki-laki) yang terkena PHK, serta sulitnya mencari lapangan kerja baru membuat kaum perempuanlah yang bangkit menjadi pengganti peran pemenuhan kebutuhan keluarga. Di permukiman pinggir kota, banyak kaum ibu yang berusaha membuka usaha kecil seperti warung, berjualan makanan/jajanan atau bekerja paruh waktu untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Dan faktanya, peran itu telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Artinya, bahwa peran yang dilekatkan pada perempuan sebagai kaum lemah dan hanya dibatasi pada peran-peran domestik (pengasuhan anak, mengurus rumah, dll.) tidak benar, karena baik laki-laki maupun perempuan, apabila diberi kesempatan yang setara dapat melakukan tugas yang sama pentingnya baik di dalam rumah (domestik) maupun di luar rumah (publik).

Berbeda dengan pendekatan teori struktural-fungsional yang menempatkan keluarga sebagai institusi dengan sistem struktur yang menempatkan kedudukan suami, istri, dan anak-anak pada posisi vertikal, sehingga peran, hak, kewajiban, tanggung jawab sangat ditentukan oleh hierarki patriakal. Sedangkan menurut teori sosial konflik, struktur yang vertikal tersebut sangat potensial untuk menimbulkan konflik berkepanjangan di dalam keluarga. Karena sistem struktur yang hierarkis seringkali menciptakan situasi yang tidak demokratis dimana pembagian sumberdaya yang terbatas (kekuasaan, kesempatan, keputusan-keputusan keluarga) berlaku mutlak tanpa proses negosiasi antaranggota keluarga.

Menurut Collins yang dikurip Megawangi (1999), bahwa keluarga yang ideal adalah yang berlandaskan *companionship*, yang hubungannya horizontal (tidak hierarkis). Model konflik memang tidak melihat kesatuan sebuah sistem, yang menurut model struktural-fungsional adalah aspek utama untuk solidnya sebuah masyarakat, tetapi lebih memfokuskan pada adanya konflik antarindividu, kelas atau kelompok. Konflik ini tentunya dianggap akan membawa perubahan, bahkan kehancuran sistem tersebut. Pada proses selanjutnya, pendekatan sosial-konflik lebih menegaskan bahkan menumbuhkan kesadaran masing-masing individu akan perbedaannya serta bagaimana perbedaan tersebut menjadi sebuah sinergi/harmoni sehingga perubahan-perubahan yang lebih baik dapat terjadi di dalam keluarga.

Tawney dikutip Megawangi (1999) mengakui adanya keragaman pada manusia, entah itu biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan, ataupun kesukaan, cocok dengan paradigma inklusif. Ia mengatakan bahwa konsep yang mengakui faktor spesifik seseorang dan memberikan haknya sesuai dengan kondisi perseorangan, atau disebut "*person-regarding equality*". Kesetaraan ini bukan dengan memberi perlakuan sama kepada setiap individu agar kebutuhannya yang spesifik dapat terpenuhi, konsep ini disebut "kesetaraan kontekstual". Artinya, kesetaraan adalah bukan kesamaan (*sameness*) yang sering menuntut persamaan matematis, melainkan lebih kepada kesetaraan yang adil yang sesuai dengan konteks masing-masing individu.

Pemahaman tentang perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan masing-masing anggota keluarga seharusnya dapat ditanamkan sejak sebuah keluarga terbentuk. Sistem patriarkat yang memposisikan fungsi-fungsi di dalam keluarga didasarkan pada struktur yang kaku serta memiliki hierarki kekuasaan yang terlalu membatasi adanya peran partisipatif antar anggota keluarga telah menyebabkan terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan. Relasi gender dalam keluarga dapat dibangun jika masing-masing individu saling memahami perbedaan dan kebutuhan yang dimiliki serta mampu memberikan kesempatan yang seimbang tanpa membeda-bedakan peran gender.

Kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan termasuk kehidupan keluarga, didasarkan pada adanya perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan masing-masing individu sehingga pada setiap peran yang dilakukan akan memiliki perbedaan. Kesetaraan gender juga tidak berarti menempatkan segala sesuatu harus sama, tetapi lebih pada pembiasaan yang didasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing anggota keluarga. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Dengan demikian, tujuan serta fungsi keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab dalam pembentukan manusia yang berkualitas dapat tercapai.

Catatan Akhir

Peran-peran dalam keluarga tidak seluruhnya kaku sebagai tugas/peran ibu, ayah, anak laki-laki, atau anak perempuan saja, tetapi ada beberapa tugas/peran yang dapat dipertukarkan. Sebaiknya, peran-peran yang melekat pada perempuan atau laki-laki di dalam keluarga tidak terjebak pada *stereotype* yang dilekatkan pada perbedaan gender. Kesalahan mendasar pada sistem keluarga, lebih banyak diakibatkan pola pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak-anaknya yang masih berorientasi pada dogma-dogma patriarkis.

Image anak perempuan lebih lemah, rapuh serta berbagai sifat-sifat feminimnya sedangkan anak laki-laki yang dipandang lebih kuat, tidak cengeng dan dengan segala atribut maskulinitasnya mengakibatkan perbedaan perlakuan dan pola pendidikan yang diberikan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, setiap anak baik perempuan maupun laki-laki memiliki sifat feminim dan maskulin meskipun pada masing-masing jenis kelamin ada sifat yang

lebih dominan. Pembiasaan perlakuan dan pembagian peran gender dalam keluarga yang tidak seimbang, bahkan menempatkan posisi perempuan sebagai subordinat banyak menimbulkan konflik dalam keluarga yang secara tidak sadar konflik tersebut akan berkembang lebih luas ke konflik masyarakat dan bahkan konflik kemanusiaan.

Relasi vertikal dalam keluarga yang memposisikan hierarki keluarga berdasarkan sistem kekuasaan telah banyak menimbulkan konflik berkepanjangan dalam keluarga, karena relasi seperti itu cenderung menumbuhkan sikap-sikap otoriter. Pendekatan yang bersifat *companionship* yaitu hubungan yang horisontal (tidak hierarkis) antar anggota keluarga lebih memungkinkan pembagian peran yang seimbang antara laki-laki (ayah/suami dan anak laki-laki) dan perempuan (ibu/istri dan anak perempuan). Kesetaraan gender yang didasarkan pada perbedaan aspirasi, kemampuan, kebutuhan spesifik masing-masing individu dalam keluarga akan menumbuhkan kesadaran kolektif antar anggota untuk memperkuat fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem keluarga. Apabila fungsi keluarga sebagai sistem terkecil dalam sebuah negara sudah berjalan dengan harmonis, maka di dalam keluarga tersebut akan tumbuh manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan kontribusi pada kemajuan masyarakat dan negara.

*Apabila ada cinta dalam perkawinan,
Akan ada suasana harmoni dalam keluarga,
Ketika suasana harmoni tercipta dalam rumah,
Maka ada kedamaian dalam masyarakat,
Apabila ada kedamaian dalam masyarakat,
Maka akan tercipta kemakmuran dalam negara,
Apabila ada kemakmuran dalam negara,
Maka akan ada kedamaian di seluruh dunia*

(Filsafat Confusius)

Daftar Pustaka

- Megawangi, Ratna, 1999: **Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender**, Penerbit Mijan, Bandung.
- Hayat, Edi dan Surur Maifhahus, 2005: **Perempuan Multikultural: Negosiasi dan Representasi**, Penerbit Desantara, Jakarta.
- Hartiningsih, 2007: Artikel Harian Kompas
- Munti, Ratna Batara dan Anisah Hindun, 2005: **Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia**, LBK-APIK Jakarta, Jakarta Timur.
- Widaningsih, Lilis, 2007: **Responsifitas Gender dalam Penulisan Bahan Ajar**, Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bandung.